



## **IMPLEMENTASI INOVASI KEBIJAKAN DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI KABUPATEN DONGGALA**

**Fadila Putri Utami**

Universitas Tadulako

**Gustafianul Shiddiq Akbar**

Universitas Tadulako

**Hajria**

Universitas Tadulako

**Ni KMG Tri Purwati**

Universitas Tadulako

Alamat: Jl. Soekarno Hatta KM. 9, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu,  
Sulawesi Tengah 94118

Korespondensi penulis:

[dillaputriutami99@gmail.com](mailto:dillaputriutami99@gmail.com)

[gustafakbar1@gmail.com](mailto:gustafakbar1@gmail.com)

[riyahajria33@gmail.com](mailto:riyahajria33@gmail.com)

[nikomangtripurwatixix@gmail.com](mailto:nikomangtripurwatixix@gmail.com)

**Abstract.** *To achieve high-quality government administration as outlined in Presidential Regulation No. 95 of 2018, which focuses on delivering optimal public services, ensuring transparency, accountability, efficiency, and fostering clean governance, local governments must develop innovative policies centered on Electronic-Based Government Systems (SPBE). This research aims to examine the implementation of innovation policies in implementing SPBE in Donggala City. This research utilized both primary and secondary data collected through interviews, observations, and documentation. The data were analyzed to derive conclusions about the issues under study. The findings reveal that the innovation policies for implementing SPBE in Donggala City have been executed effectively, evident in the development of service applications that enhance public accessibility. Nevertheless, challenges persist, including limited public awareness about the applications and a shortage of human resources with specialized technical skills in Information and Communication Technology (ICT).*

**Keywords:** Innovation, Policy, Electronic Based Government System (SPBE).

**Abstrak.** Agar mencapai penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas sejalan dengan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018, yang bertujuan untuk memberikan layanan optimal dalam menjalankan urusan pemerintahan serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efisien, dan bersih, pemerintah daerah diwajibkan untuk merumuskan kebijakan inovasi berbasis Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan inovasi dalam penerapan SPBE di Kota Donggala. Data yang digunakan, baik primer maupun sekunder, dikumpulkan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan terkait permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan inovasi dalam penyelenggaraan SPBE di Kota Donggala telah dilaksanakan dengan baik, terlihat dari terciptanya aplikasi layanan yang mempermudah akses masyarakat. Namun, terdapat

---

*Received Desember 30, 2023; Revised Januari 30, 2024; Accepted Februari 29, 2024*

*\* Chantika Bahtra Dewi, [cantika4november2002@gmail.com](mailto:cantika4november2002@gmail.com)*

beberapa kendala, seperti terbatasnya sosialisasi mengenai aplikasi tersebut dan kekurangan tenaga kerja dengan kompetensi teknis di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

**Kata kunci: Inovasi, Kebijakan, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).**

## LATAR BELAKANG

Teknologi yang semakin berkembang menuntut semua pihak termasuk otoritas Daerah terus melakukan inovasi dalam melakukan pelayanan publik terhadap masyarakat. Satu diantara upaya yang dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi untuk mengoptimalkan pemerintahan adalah penetapan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Kebijakan inovasi dalam pelaksanaan Sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) merupakan langkah strategis yang diambil pemerintah Indonesia untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelayanan publik. Di tengah era digital, kebutuhan akan sistem yang terintegrasi dan berbasis teknologi informasi semakin mendesak. Kebijakan ini tidak hanya bertujuan untuk memodernisasi administrasi pemerintahan, tetapi juga untuk memenuhi ekspektasi warga yang semakin sadar dan peduli terhadap mutu layanan publik. Kebijakan inovasi adalah inisiatif dan arah kebijakan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah. Inovasi kebijakan penting untuk dilakukan agar pemerintah dapat menghadapi perubahan dan tantangan di masa mendatang.

Namun, penerapan kebijakan ini menghadapi berbagai tantangan. Banyak daerah, termasuk Kabupaten Donggala, menghadapi kendala seperti minimnya infrastruktur teknologi, keterbatasan Tenaga kerja yang mahir dalam bidang teknologi informasi, serta resistensi terhadap perubahan dari aparatur pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, seperti pelatihan bagi pegawai dan peningkatan infrastruktur teknologi.

Dengan latar belakang tersebut, studi ini bertujuan untuk melakukan analisis yang lebih mendalam bagaimana kebijakan inovasi dapat diterapkan dalam konteks SPBE di Kabupaten Donggala, serta dampaknya terhadap pelayanan publik dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

## KAJIAN TEORITIS

Kebijakan ialah serangkaian pilihan yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip tertentu dan siap untuk diambil. Kebijakan ini dihasilkan melalui analisis yang mendalam terhadap berbagai opsi, yang kemudian mengarah pada penetapan keputusan terbaik (Pasolong, 2008).

*Electronic-Based Government System* adalah pelaksanaan pemerintahan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana guna memberikan layanan kepada para pengguna SPBE. Taufik (2005) berpendapat, pentingnya mendorong koherensi dalam kebijakan inovasi tak terlepas dari karakteristik inovasi itu sendiri, termasuk kecenderungan munculnya fenomena baru yang berkaitan dengan inovasi. Pendekatan sistem inovasi turut memengaruhi perubahan dalam kebijakan inovasi. Tiga dimensi utama yang menjadi perhatian dalam isu ini adalah dimensi tata kelola kebijakan, dimensi sektoral, serta dimensi interaksi.

*IMPLEMENTASI MEDIA TERHADAP RESPON SISWA DALAM PENGEMBANGAN KARTU BERGAMBAR KREATIF PADA TOPIK TRANSFORMASI ENERGI DI SEKITAR KITA PADA SISWA KELAS 4 DI SDN DUKUH PUNDONG 2 JOMBANG*

Menurut Mulyadi (Mulyadi, 2005, pp. 129-133), Implementasi mengacu pada rangkaian langkah yang diambil untuk merealisasikan tujuan yang telah ditentukan dalam sebuah keputusan. Tindakan ini bertujuan untuk menerjemahkan keputusan-keputusan tersebut ke dalam pola-pola operasional, sekaligus mencapai perubahan, baik besar maupun kecil, sesuai dengan keputusan yang telah dibuat. Secara mendasar, implementasi juga merupakan upaya memahami apa yang seharusnya terjadi setelah program dilaksanakan.

Sedangkan (Tahir, 2014, p. 55) "Implementasi diartikan sebagai serangkaian tindakan yang dilakukan oleh individu, pejabat, atau kelompok, baik dari pemerintah maupun swasta, yang bertujuan untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam suatu kebijakan".

Ekawati (Taufik & Isril, 2013) Menyatakan bahwa "implementasi secara eksplisit mencakup tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dari sektor publik maupun swasta, yang secara langsung bertujuan untuk mencapai serangkaian sasaran yang telah ditentukan dalam keputusan kebijakan yang dibuat sebelumnya."

Berdasarkan berbagai pandangan di atas, implementasi dapat dipahami sebagai sebuah proses yang berhubungan dengan kebijakan dan program yang akan dijalankan oleh sebuah organisasi atau institusi. Langkah ini terutama berhubungan dengan institusi negara dan melibatkan penggunaan sarana serta prasarana untuk mendukung pelaksanaan program-program tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Pada riset ini menggunakan metode kualitatif. Menurut (Sugiyono, 2018) Metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan pendekatan penelitian yang didasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk mengkaji kondisi objek yang bersifat alami, dengan peneliti berperan sebagai instrumen utama. Analisis data kualitatif melibatkan empat tahapan penting yang dilakukan secara berulang, yaitu: pengumpulan data, penyederhanaan atau reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan secara berkesinambungan selama penelitian (Miles, et al., 2014). Dalam Riset ini teknik pengumpulan data yang digunakan, yakni telaah kepustakaan, penelitian lapangan (*field research*), serta observasi pengamatan terlibat, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data kualitatif terdiri dari empat tahap utama yang dilakukan secara berulang, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan-tahapan ini saling berkaitan dan menjadi bagian dari proses analisis dalam penelitian kualitatif (Miles, et al., 2014)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Studi tentang ketentuan Inovasi dalam Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Donggala dapat dianalisis lebih mendalam melalui tiga dimensi penting dalam administrasi publik menurut Taufik (2005): dimensi administrasi, dimensi sektoral, dan dimensi interaksi.

### **Dimensi administrasi**

Dimensi administrasi berfokus pada struktur dan proses organisasi pemerintahan. Dalam konteks SPBE, Kabupaten Donggala perlu membangun struktur organisasi yang mendukung penerapan teknologi informasi. Hal ini mencakup pembentukan unit khusus yang bertanggung jawab atas pengembangan dan implementasi SPBE, serta penetapan prosedur kerja yang efisien. Penelitian menunjukkan bahwa dukungan dari pimpinan daerah sangat krusial untuk mendorong perubahan budaya kerja di kalangan pegawai. Selain itu, pelatihan berkelanjutan bagi pegawai dalam penggunaan teknologi informasi sangat penting untuk meningkatkan keterampilan mereka. Dengan adanya pelatihan ini, pegawai akan lebih mampu memanfaatkan sistem SPBE secara optimal, sehingga meningkatkan kinerja organisasi. Ketersediaan infrastruktur teknologi juga menjadi perhatian utama. Kabupaten Donggala harus memastikan bahwa infrastruktur pendukung, seperti jaringan internet yang stabil dan perangkat keras yang memadai, tersedia untuk semua instansi pemerintah. Penelitian menunjukkan bahwa tanpa infrastruktur yang memadai, implementasi SPBE akan terhambat, dan tujuan peningkatan efisiensi serta transparansi tidak dapat tercapai. Oleh karena itu, investasi dalam teknologi dan infrastruktur menjadi tindakan strategis yang perlu diambil oleh pemerintah daerah.

### **Dimensi Sektoral**

Pada dimensi sektoral menyentuh aspek layanan publik yang spesifik. Di Kabupaten Donggala, penerapan SPBE diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan di berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan. Misalnya, pengembangan aplikasi pelayanan kesehatan berbasis elektronik dapat mempercepat akses masyarakat terhadap layanan medis dan mengurangi antrian di fasilitas kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi dalam sektor-sektor ini tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga memperbaiki kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Dalam sektor pendidikan, penerapan sistem informasi manajemen sekolah berbasis elektronik dapat membantu dalam pengelolaan data siswa dan guru secara lebih efisien. Ini juga memungkinkan orang tua untuk mengakses informasi terkait perkembangan anak mereka dengan lebih mudah. Dengan demikian, kebijakan inovasi dalam SPBE dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap kualitas layanan publik di berbagai sektor. Dimensi interaksi menekankan hubungan antara pemerintah dan masyarakat. Kebijakan inovasi dalam SPBE harus menciptakan saluran komunikasi yang efektif antara pemerintah dan warga. Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan sangat penting untuk menciptakan pemerintahan yang responsif. Melalui platform digital, masyarakat dapat memberikan masukan dan umpan balik secara langsung terhadap layanan yang diberikan.

### **Dimensi Interaksi**

Aspek keterkaitan dengan area kebijakan lainnya, termasuk kebijakan inovasi, seringkali memerlukan implementasi melalui kebijakan lain. Oleh sebab itu, konsep inovasi dan sistem inovasi harus terhubung secara erat dengan berbagai kebijakan yang relevan. Pada dasarnya, kebijakan inovasi adalah aturan yang bisa diimplementasikan di setiap kementerian sesuai dengan bidang kewenangannya masing-masing. Dari sudut pandang kebijakan inovasi, diperlukan sinkronisasi antar kebijakan agar tidak terjadi tumpang tindih, kontradiksi, atau bahkan saling meniadakan dampaknya. Penerapan kebijakan ini telah menunjukkan hasil yang cukup baik,

seperti terlihat dari dukungan kuat Kepala Daerah dalam mempercepat pelaksanaan SPBE di Kota Dumai. Hal ini bertujuan untuk menjadikan pemerintahan yang transparan, partisipatif, inovatif, dan akuntabel, yang menjadi cita-cita setiap Kepala Daerah dengan menyertakan semua OPD dalam prosesnya.

Penerapan fitur-fitur seperti forum diskusi online atau aplikasi pengaduan masyarakat dapat meningkatkan keterlibatan warga pada proses mengambil keputusan. Hal tersebut tidak hanya meningkatkan transparansi tetapi juga membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya interaksi yang baik, pemerintah dapat lebih memahami kebutuhan masyarakat dan meresponsnya dengan cepat. Secara keseluruhan, kebijakan inovasi dalam penyelenggaraan SPBE di Kabupaten Donggala menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dengan memperhatikan ketiga dimensi yang dijelaskan oleh Taufik (2005), yaitu administrasi, sektoral, dan interaksi, pemerintah daerah dapat membangun sistem pemerintahan yang lebih efektif, terbuka, dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Namun, tantangan seperti infrastruktur yang belum memadai dan kurangnya keterampilan pegawai perlu diatasi untuk mencapai tujuan tersebut secara optimal. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran jelas tentang bagaimana kebijakan inovasi dapat diterapkan secara efektif dalam konteks SPBE di Kabupaten Donggala serta dampaknya terhadap peningkatan pelayanan publik dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

#### **A. Faktor penghambat**

Berikut adalah berbagai faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kebijakan inovasi terkait penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Dumai:

- a. Keterbatasan Sumber Daya Manusia dengan Keahlian Teknis  
Tenaga kerja yang kompeten memegang peranan penting dalam pelaksanaan kebijakan inovasi SPBE. Tanpa dukungan SDM yang memadai, kebijakan yang dirancang oleh pemerintah sulit untuk diimplementasikan secara optimal dan efisien. Temun penelitian di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar SDM yang terlibat belum berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), melainkan Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kontrak (TKPK). Hal ini berarti mereka dapat mengundurkan diri atau mengakhiri hubungan kerja dengan pemerintah, khususnya Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Dumai, kapan saja. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terhadap kelangsungan pelaksanaan kebijakan inovasi SPBE di masa mendatang..
- b. Kurangnya integrasi dalam proses sistem aplikasi  
Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Tugas-tugas yang sebelumnya dilakukan secara manual kini dapat diselesaikan dengan lebih mudah dan cepat melalui sistem aplikasi berbasis digital. Namun, apabila sistem aplikasi yang digunakan di masing-masing OPD berjalan secara terpisah atau parsial, hal ini dapat menyebabkan redundansi aplikasi, ketidaksinkronan, serta belum tersedianya standar layanan data yang optimal.
- c. Kurangnya dukungan pendanaan atau anggaran  
Terbatasnya alokasi anggaran untuk pelaksanaan inovasi SPBE merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan kegagalan dalam proses inovasi. Tanpa alokasi anggaran yang memadai, inovasi SPBE berisiko kehilangan momentum dalam pengembangannya. Anggaran yang dialokasikan dalam perencanaan pada OPD

mencerminkan komitmen organisasi untuk mencapai tujuan dan menciptakan terobosan yang signifikan.

Sebenarnya, guna mempercepat perkembangan dan meningkatkan daya saing bangsa dalam menuju *good governance*, terutama dalam hal pembaruan kebijakan inovasi, dukungan anggaran sangat diperlukan. Proses ini tidak bisa dilakukan secara cepat, melainkan memerlukan upaya yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Kabupaten Donggala menunjukkan potensi yang signifikan, namun juga menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi. Dalam dimensi penadbiran, penelitian mengungkapkan bahwa komunikasi antara pemerintah dan masyarakat masih kurang efektif. Banyak warga yang belum memahami sepenuhnya manfaat dan cara menggunakan aplikasi perizinan online, seperti OSS. Selain itu, dukungan anggaran untuk pengembangan dan pemeliharaan SPBE sangat minim, sehingga menghambat efektivitas implementasi kebijakan. Koordinasi antar lembaga pemerintahan juga menjadi masalah, di mana masing-masing departemen sering memiliki visi dan strategi yang berbeda-beda, sehingga kerja sama yang harmonis sulit dicapai. Hambatan utama dalam dimensi ini meliputi kurangnya kompetensi staf teknis, biaya operasional yang tinggi, serta perubahan pola pikir pegawai yang tidak siap untuk beradaptasi dengan teknologi baru.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya mengenai pelaksanaan Kebijakan Inovasi dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Donggala, setelah mengidentifikasi dan menguraikan setiap indikator, peneliti dapat menyimpulkan hal-hal berikut:

1. Pelaksanaan Kebijakan Inovasi dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) di Kota Donggala telah dilaksanakan dengan cukup baik, yang dapat dilihat dari diantara indikator berikut: *a)* Dimensi tata kelola kebijakan (*policy governance*), yang sudah memiliki kelembagaan dan dasar hukum berupa Peraturan Walikota Dumai dan Surat Keputusan Walikota; *b)* Dimensi sektoral, meskipun terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi secara umum meski dengan tingkat yang berbeda, pelaksanaan layanan administrasi berbasis elektronik masih kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh belum terintegrasinya beberapa aplikasi yang ada di Pemerintah Kota Donggala, serta terbatasnya sarana prasarana dan sumber daya yang dibutuhkan; dan *c)* Dimensi interaksi dengan regulasi lain, di mana kebijakan inovasi sering kali perlu diimplementasikan bersama kebijakan lain. Oleh sebab itu, konsep inovasi dan sistem inovasi perlu semakin terintegrasi dengan berbagai kebijakan terkait lainnya. Aspek ini telah berjalan dengan cukup baik, terutama dengan dukungan Kepala Daerah dalam mendorong pelaksanaan SPBE di Kota Donggala, seperti penerapan aplikasi e-Office untuk surat menyurat, e-absensi untuk daftar hadir, dan sistem pengimputan data serta informasi ([datin.dumaikota.go.id](http://datin.dumaikota.go.id)), yang merupakan implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI).

*IMPLEMENTASI MEDIA TERHADAP RESPON SISWA DALAM PENGEMBANGAN KARTU BERGAMBAR KREATIF PADA TOPIK TRANSFORMASI ENERGI DI SEKITAR KITA PADA SISWA KELAS 4 DI SDN DUKUH PUNDONG 2 JOMBANG*

2. Pelaksanaan Kebijakan Inovasi dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Donggala menghadapi tiga faktor penghambat utama, yaitu:  
*a)* keterbatasan Sumber Daya Manusia yang memiliki keahlian teknis, *b)* belum terintegrasinya proses sistem aplikasi, dan *c)* minimnya dukungan pendanaan atau alokasi anggaran.

## **SARAN**

Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi instansi terkait dalam mendukung pelaksanaan kebijakan inovasi di masa depan:

1. Pelaksanaan Kebijakan Inovasi dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Donggala telah berjalan dengan baik, Namun, hal ini perlu ditingkatkan dengan menambah kelengkapan dokumen administrasi pendukung untuk mengikuti evaluasi indeks inovasi daerah. Selain itu, sosialisasi dan implementasi kebijakan harus terus dilakukan, serta pemantauan dan evaluasi SPBE bagi seluruh OPD di Kota Donggala perlu dilaksanakan secara berkelanjutan.
2. Keterbatasan tenaga kerja yang memiliki keahlian teknis, yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kebijakan inovasi, dapat diajukan kepada OPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Donggala dengan memasukkannya ke dalam peta jabatan ASN. Selain itu, untuk mencegah terjadinya redundansi data aplikasi, ketidaksinkronan, dan kurangnya standar layanan data yang baik, pengelolaan data dapat dimaksimalkan melalui *Forum Group Discussion* (FGD) Data se-Kota Donggala. Untuk mendukung pendanaan, perencanaan dan penganggaran kegiatan dapat dimasukkan dalam renstra dan renja OPD Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kota Donggala, dengan melakukan koordinasi yang erat dengan pihak-pihak terkait, seperti OPD BAPPEDALITBANG Kota Dumai dan OPD BPKAD Kota Donggala.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Hidayati, S.N. (2016). Pengaruh Pendekatan Keras dan Lunak Pemimpin Organisasi terhadap Kepuasan Kerja dan Potensi Mogok Kerja Karyawan. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(2), 57-66. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i2.164>.
- Risdwiyanto, A. & Kurniyati, Y. (2015). Strategi Pemasaran Perguruan Tinggi Swasta di Kabupaten Sleman Yogyakarta Berbasis Rangsangan Pemasaran. *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, 5(1), 1-23. <http://dx.doi.org/10.30588/SOSHUMDIK.v5i1.142>.
- Bator, R. J., Bryan, A. D., & Schultz, P. W. (2011). Who Gives a Hoot?: Intercept Surveys of Litterers and Disposers. *Environment and Behavior*, 43(3), 295–315. <https://doi.org/10.1177/0013916509356884>.
- Norsyaheera, A.W., Lailatul, F.A.H., Shahid, S.A.M., & Maon, S.N. (2016). The Relationship Between Marketing Mix and Customer Loyalty in Hijab Industry: The Mediating Effect of Customer Satisfaction. In *Procedia Economics and Finance*

- (Vol. 37, pp. 366–371). Elsevier B.V. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(16\)30138-1](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(16)30138-1).
- Armand, F. (2003). Social Marketing Models for Product-Based Reproductive Health Programs: A Comparative Analysis. *Occasional Paper Series*. Washington, DC. Retrieved from [www.cmsproject.com](http://www.cmsproject.com).
- Belair, A. R. (2003). Shopping for Your Self: When Marketing becomes a Social Problem. *Dissertation*. Concordia University, Montreal, Quebec, Canada.
- Lindawati (2015). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Usahatani Terpadu Padi-Sapi di Provinsi Jawa Barat. Institut Pertanian Bogor. Retrieved from <http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/85350>.
- Kotler, P., & Lee, N. R. (2009). *Up and Out of Poverty: The Social Marketing Solution*. New Jersey: Pearson Education, Inc.
- LPPSP. (2016). *Statistik Indonesia 2016*. Badan Pusat Statistik, 676. Jakarta. Diakses dari <https://www.LPPSP.go.id/index.php/publikasi/326>.
- Risdwiyanto, A. (2016). Tas Kresek Berbayar, Ubah Perilaku Belanja? *Kedaulatan Rakyat*, 22 Februari, 12.
- Chain, P. (1997). Same or Different?: A Comparison of the Beliefs Australian and Chinese University Students Hold about Learning's Proceedings of AARE Conference. Swinburne University. Available at: <http://www.swin.edu.au/aare/97pap/CHAN97058.html>, diakses tanggal 27 Mei 2000.
- StatSoft, Inc. (1997). Electronic Statistic Textbook. Tulsa OK., StatSoft Online. Available at: <http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html>, diakses tanggal 27 Mei 2000.